

**TAHUN
2019**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DIY

Jalan Sagan III/4 Yogyakarta

Telp. (0274) 512386, Faksimili (0274) 560386

Website: www.dislautkan..jogjapro.go.id

Email: dislautkan@jogjapro.go.id

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Tahun 2019 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019. LKjIP Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Tahun 2019 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta, 7 Februari 2020

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY



Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan DIY tahun 2019 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “Meningkatnya nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY (ADHK)”:
 - Diukur dengan indikator nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY tahun n (ADHK).
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 5 (lima) Program, yakni Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, Program Peningkatan Produksi Perikanan Tagkap, Program Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan dan Program Pengembangan Perbenihan Perikanan Budidaya, Program Pengelolaan Pelabuhan.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2019 sebesar 322,136 juta rupiah sampai dengan bulan Desember 2019 terealisasi 322,386 juta rupiah. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100,08%.
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2018 sebesar 320,348 juta rupiah terjadi peningkatan sebesar 100,64%
2. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya status kawasan konservasi”:
 - Diukur dengan indikator Persentase peningkatan status per tahapan kawasan konservasi.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Konservasi Ekosistem dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2019 sebanyak 30 persen; sampai dengan akhir Bulan Desember 2019 terealisasi 30 persen. Dengan demikian capaian ini telah sesuai target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100%.

- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2018 sebanyak 20 persen terjadi peningkatan sebanyak 150%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Kelautan dan Perikanan DIY ke depan, sebagai berikut:

1. Peningkatan PDRB subsektor perikanan yang terdiri dari unsur pendapatan nelayan, pembudidaya maupun pengolah perlu dioptimalkan lagi melalui pendampingan dan penyediaan sarana prasarana produksi. Pembangunan Pelabuhan Gesing dan penyelesaian proses KPBU Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta akan menjadi fokus utama.
2. Pemasaran produk perikanan dan kelautan akan sangat terbantu dengan adanya internet, melalui pemasaran e-commerce menysasar kepada generasi milenial.
3. Kepemimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru akan mengoptimalkan peran Kabupaten dan Provinsi untuk memajukan daerah melauai dana DAK, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
4. Penyelesaian dan Implementasi Perda RZWP3K perlu perhatian lebih karena terkait dengan peraturan perundaang-undangan. Selain itu target penetapan kawasan konservasi oleh Meneteri Kelautan dan Perikanan tahun 2022 harus dipersiapkan mulai dari sekarang agar tercapai.
5. Kewenangan penanaman mangrove berada di Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan hanya berwenang untuk pengelolaan ekosistem airnya. Dengan demikian perlu adanya koordinasi dan kolaborasi untuk pengelolaan mangrove yang terintegrasi.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR	7
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah	8
1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	9
1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan	11
1.4 Isu-isu Strategis	12
1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	13
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2018	16
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	17
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	17
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	18
2.3 Struktur Program dan kegiatan 2019	19
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2019	20
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	23
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2019	24
3.2. Analisis Ketercapaian Kinerja Tahun 2019.....	30
3.3. Realisasi Anggaran.....	32
BAB IV PENUTUP.....	35
LAMPIRAN-LAMPIRAN	36

Daftar Tabel

Tabel I.1	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikas Jabatan dan Jenis Kelamin	13
Tabel I.2	Sarana-Prasarana.....	15
Tabel I.3	Perbandingan Anggaran Tahun 2018 dan 2019	16
Tabel II.1	Sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, 2017-2022	18
Tabel II.2	Strategi dan Arah Kebijakan.....	18
Tabel II.3.1	Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2019	19
Tabel II.3.2	Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2019	20
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Tahun 2019.	21
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	23
Tabel III.2	Capaian Kinerja Tahun 2019	24
Tabel III.3	Pengukuran Capaian Sasaran 1	24
Tabel III.4	Target dan Realisasi Kinerja	25
Tabel III.5	Produksi dan Nilai Produksi Perikanan.....	26
Tabel III.6	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2019	32

Daftar Gambar

Gambar I.1.	Cascading Kinerja	9
Gambar I.2.	Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	10
Gambar I.3.	Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan DIY.....	11
Gambar II.1.	Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP	22
Gambar II.2.	Tampilan Website Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	22
Gambar III.1.	Grafik PDRB Subsektor Perikanan 2014-2019.....	25
Gambar III.2.	Usaha Perikanan Budidaya dengan Sistem Kolam Bulat.....	27
Gambar III.3.	Bimbingan Teknis Penggunaan Alat Tangkap Ramah Lingkungan untuk Nelayan.....	27
Gambar III.4.	Dokumen Perda DIY tentang RZWP3K	28
Gambar III.5.	Dokumen Pergub Perizinan Pengelolaan Pesisir	29
Gambar III.6.	Sosialisasi Pergub Perizinan Pengelolaan Kawasan Pesisir	29
Gambar III.7.	Produksi Perikanan DIY 2014-2019	30
Gambar III.8.	Sistem Informasi Manajemen Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (www.simpropekandaya.com)	34

BAB I

Pendahuluan

Bab I berisi :

1. *Cascading Kinerja*
2. *Mandat Kinerja, Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
3. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
4. *Isu-Isu Strategis*
5. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
6. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun sebelumnya*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

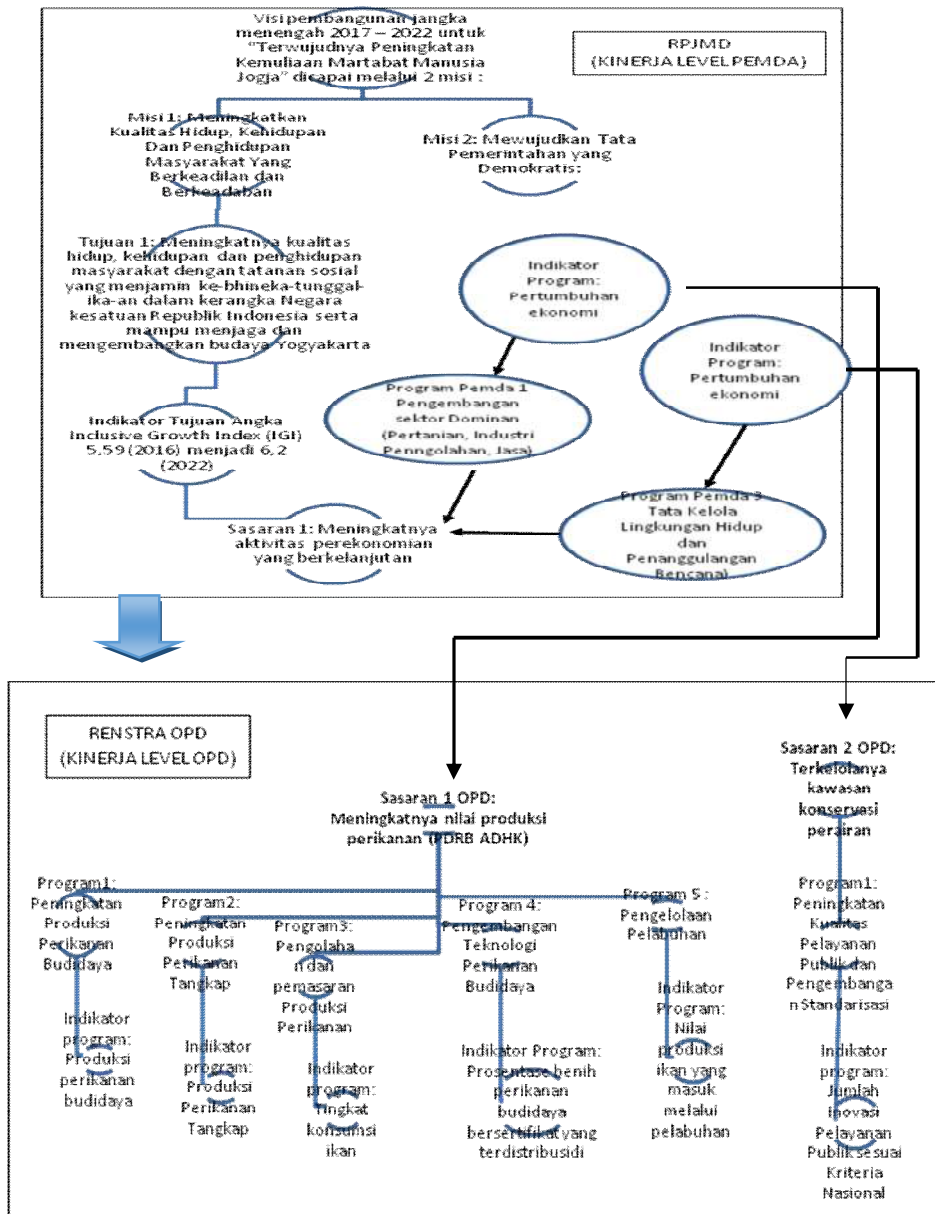
Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah DIY, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY tahun 2017 – 2022. Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

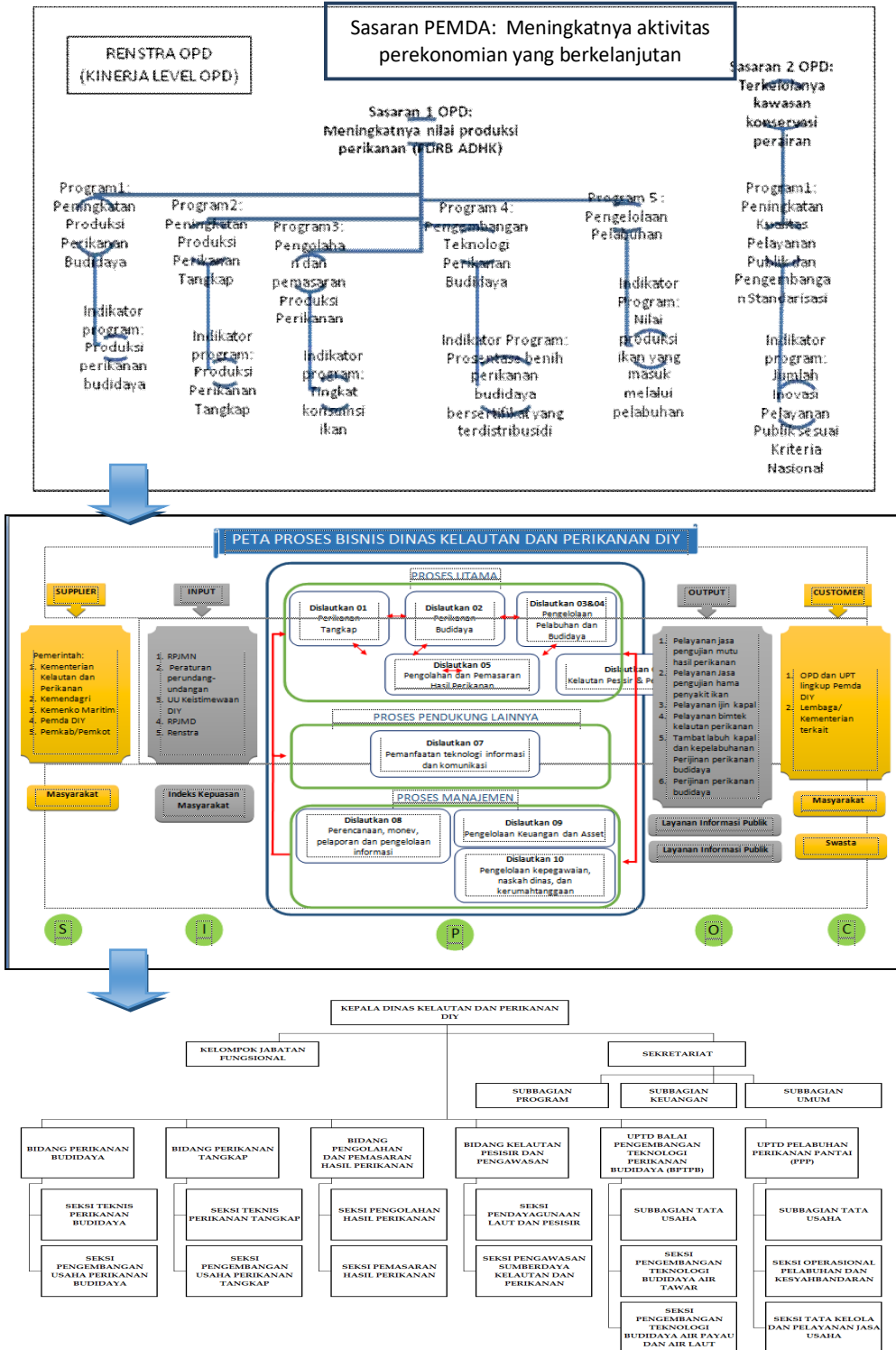
Gambar I.1 Cascading Kinerja



1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Kelautan dan Perikanan DIY

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Biro Organisasi Setda DIY sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Gambar 1.2 Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Kelautan dan Perikanan DIY



1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan DIY

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 61 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan. Adapun fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan DIY sebagai berikut

1. Penyusunan program kerja Dinas;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
3. Pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
4. Pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
5. Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
6. Pengembangan teknologi perikanan budidaya;
7. Pengelolaan pelabuhan perikanan pantai;
8. Perencanaan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
9. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan ruang laut;
10. Pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
11. Penerbitan rekomendasi izin penangkapan ikan;
12. Penerbitan rekomendasi izin budidaya ikan antar Kabupaten/Kota dalam DIY;
13. Penerbitan rekomendasi izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan;
14. Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan pengetahuan, adat istiadat dan tradisi luhur bidang kelautan dan perikanan;
15. Fasilitasi perlindungan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam;
16. Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan;
17. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
18. Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
19. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang kelautan dan Perikanan;

Jabatan Struktural/Fungsional	Jabatan Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris Dinas: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kasubbag Umum 2) Kasubbag Keuangan 3) Kasubbag Program 3. Kabid Perikanan Budidaya: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kasi Teknis Perikanan Budidaya 2) Kasi Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya 4. Kabid Perikanan Tangkap: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kasi Teknis Perikanan Tangkap 2) Kasi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap 5. Kabid Kelautan, Pesisir dan Pengawasan : <ol style="list-style-type: none"> 1) Kasi Pendayagunaan Laut dan Pesisir 2) Kasi Pengawasan Sumberdaya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dibawah Kasubbag Umum: <ol style="list-style-type: none"> 1) Penata Kearsipan 2) Pengadministrasi Umum 3) Pengelola Barang Milik Negara 2. Dibawah Keuangan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Verifikator Data Laporan Keuangan 2) Pengelola Akuntansi 3) Bendahara 4) Pengelola Gaji 3. Dibawah Kasubbag Program: <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 2) Pengelola Sistem dan Jaringan 4. Dibawah Kasi Teknis Perikanan Budidaya: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi Umum 2) Analis Perikanan Budidaya 3) Calon Pengawas Perikanan Pertama 5. Dibawah Kasi Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengelola Pengembangan Budidaya dan Pemasaran

Jabatan Struktural/Fungsional	Jabatan Pelaksana
Kelautan dan Perikanan 6. Kabid Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan: 1) Kasi Pengolahan Hasil Perikanan 2) Kasi Pemasaran Hasil Perikanan 7. Jabatan Fungsional: 1) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan 2) Pengawas Benih Ikan 3) Pengawas Perikanan	2) Calon Pengawas Perikanan Pertama 6. Dibawah Kasi Teknis Perikanan Tangkap: 1) Analisis Kenelayanan 2) Pengadministrasi Umum 7. Dibawah Kasi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap: 1) Pengelola Pengembangan dan Pembinaan Usaha; 8. Dibawah Kasi Pendayagunaan Laut dan Pesisir: 1) Analisis Konservasi dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir; 2) Pengadministrasi Umum 9. Dibawah Kasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan: 1) Pengawas Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; 2) Analisis Konservasi dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir 10. Dibawah Kasi Pengolahan Hasil Perikanan: 1) Analisis Mutu Hasil Perikanan; 11. Dibawah Kasi Pemasaran Hasil Perikanan: 1) Pengelola Pemasaran;

1.4 Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Dinas Kelautan dan Perikanan DIY sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan "Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan", antara lain sebagai berikut:

1. Birokrasi pemerintah yang bersih dan akuntabel.
 Terwujudnya birokrasi pemerintah yang bersih dan akuntabel merupakan harapan dan tuntutan masyarakat. Hal ini terkait erat dengan pentingnya membangun sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, baik menyangkut aspek perencanaan, penganggaran, penetapan kinerja, pelaksanaan kinerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja. Semua aspek kinerja harus dapat dipertanggungjawabkan dan dipertanggunggugatkan serta bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Telah terbit Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah bahwa kewenangan budidaya yang sebelumnya berada di Kabupaten diubah menjadi kewenangan bersama Provinsi sehingga Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dapat menganggarkan sarpras budidaya air tawar, laut dan payau.
3. Penyelesaian pembangunan Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta melalui mekanisme KPBU sudah sampai pada penyusunan DPP (Daftar Prioritas Proyek)

oleh PT. PII yang didanai oleh Kementerian Keuangan. Selanjutnya untuk mendapatkan pendanaan OBC (Outline Bussiness Case) dari Bappenas harus menyatukan dulu asetnya (BBWSO, Perhubungan, Kabupaten Kulon Progo dan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY). Penggabungan aset ini akan dimotori oleh BPKA Bidang Aset yang diperkirakan membutuhkan waktu yang cukup lama.

4. Untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap dan membuka akses jalur selatan, maka akan dibangun Pelabuhan Perikanan Gesing di Gunungkidul dengan dana APBD. Tahun 2020 telah dianggarkan Rp. 650.000.000,- untuk kajian Masterplan dan DED. Selanjutnya pada tahun 2021 akan dibuat Amdal dan rencana pembebasan tanah melalui appraisal.
5. Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru akan mengucurkan dana yang cukup besar ke daerah untuk memajukan pembangunan Kelautan dan Perikanan melalui Dekonsentrasi, DAK dan Tugas Pembantuan.

1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumberdaya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2019 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan dan Jenis Kelamin

No	Jabatan	Formasi		Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi	Jml	Kualifikasi	Laki	Perempuan
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Jabatan Struktural						
1	Kepala Dinas	1	S1	1	S2	√	
2	Sekretariat	1	S1	1	S2	√	
3	Kabid Perikanan Budidaya	1	S1				
4	Kabid Perikanan Tangkap	1	S1				
5	Kabid Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1	S1	1	S1		√
6	Kabid Kelautan, Pesisir dan Pengawasan	1	S1				
7	Subbagian Program	1	S1	1	S2	√	
8	Subbagian Keuangan	1	S1	1	S1		√
9	Subbagian Umum	1	S1	1	S2		√
10	Seksi Teknis Perikanan Budidaya	1	S1	1	S2	√	
11	Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya	1	S1	1	S2		√
12	Seksi Teknis Perikanan Tangkap	1	S1	1	S2	√	
13	Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap	1	S1	1	S2		√
14	Seksi Pengolahan Hasil Perikanan	1	S1	1	S1	√	
15	Seksi Pemasaran Hasil Perikanan		S1	1	S1	√	

Sumber: Data Kepegawaian Biro Desember 2019

No	Jabatan	Formasi		Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi	Jml	Kualifikasi	Laki	Perempuan
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Seksi Pendayagunaan Laut dan Pesisir	1	S1	1	S2		√
17	Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	1	S1	1	S2	√	
B	Jabatan Pelaksana Substantif						
18	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	4	S1	3	S1, S2	√	√
19	Pengelola Sistem dan Jaringan	1	S1, D4	1	S1		√
20	Analisis Perikanan Budidaya	5	S1	1	S1	√	
21	Analisis Kenelayanan	5	S1	2	D3, S2	√	
22	Analisis Mutu Hasil Perikanan	5	S1	3	S1, SMA	√	√
23	Pengelola Pengembangan Budidaya dan Pemasaran Perikanan	5	S1	2	S1, D4	√	√
24	Pengelola Pengembangan dan Pembinaan Usaha	5	S1	2	S1, S2	√	
25	Analisis Konservasi dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir	5	S1	2	S2	√	
26	Pengawas Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	5	S1	2	S1, D4	√	√
27	Pengawas perikanan (JFT)	10	S1	4	S1	√	√
28	Pengelola Pemasaran	5	S1	2	S1	√	√
C	Jabatan Pelaksana Pendukung/Administratif						
29	Bendahara	2	S1	1	D3		√
30	Pengadministrasian Keuangan	4	D3				
31	Pengelola Gaji	1	D3	1	SMA	√	
32	Pengelola Akuntansi	1	D3	1	D3		√
33	Verifikator Data laporan Keuangan	1	D3	1	D3		√
34	Pengadministrasian Umum	4	D3	4	SMP, SMA, D3, S1	√	√
35	Pengadministrasian Persuratan	1	D3				
36	Pranata Kearsipan	1	D3	1	SMA		√
37	Pengadministrasian Kepegawaian	1	D3	1	SMA		√
38	Teknisi Sarana dan Prasarana	1	D3				
39	Pengelola Barang Milik Negara	3	D3	2	D3, SMA	√	√
40	Pengemudi	1	SMA				
41	CPNS			3	S1	√	√
	Jumlah	91		49			

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Kelautan dan Perikanan DIY relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 21 orang (42,86%) , disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 14 orang (28,57%), D4 sebanyak 2 orang (4,08%), D3 sebanyak 5 orang (10,20%), SLTA sebanyak 6 orang (12,24%) dan SMP sebanyak 1 orang (2,04%). Komposisi pegawai laki-laki sedikit lebih banyak

dibanding pegawai perempuan; untuk jabatan struktural berimbang antara laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 42 orang, terdiri dari 3 orang pejabat struktural, 30 orang pejabat pelaksana substantif dan 9 pejabat pelaksana administratif. Tidak ada pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi jabatan pada jabatan pelaksana substantif dan tidak ada yang tidak kompeten melaksanakan tugas dalam jabatan pelaksana substantif. Terdapat tiga jabatan struktural yang belum terisi yakni Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Kepala Bidang perikanan Tangkap dan Kepala Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan. Hal ini tentu berpengaruh pada optimalisasi tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
	Aset Tetap		
1	Tanah	20 bidang	13.892.166.000
2	Peralatan dan Mesin	2.722 unit	18.671.866.674,18
3	Gedung dan Bangunan	129 unit	72.562.143.887,98
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	197 unit	115.490.671.978
5	Aset Tetap Lainnya	4.047 unit	392.770.500
	Jumlah		221.009.619,040

**Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2019*

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan, 7 (tujuh) unit kendaraan operasional, dan 21 (dua puluh satu) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal computer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

Berikut disajikan Anggaran Belanja Dinas Kelautan dan Perikanan DIY tahun 2018-2019:

Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2018 dan 2019

Tahun	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah
2018	Rp. 7.413.517.728,00	Rp. 15.990.860.531,00	Rp. 23.404.378.259,00
2019	Rp. 7.378.165.899,00	Rp. 24.551.448.620,00	Rp. 31.929.614.519,00

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan DIY berasal dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dana Keistimewaan. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2019 dibanding tahun 2018 terdapat kenaikan anggaran belanja langsung yang cukup signifikan sebesar Rp. 8.525.236.260,00. Hal ini menunjukkan tidak ada kendala anggaran untuk membiayai program/kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY.

1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2018

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	<p>Surat Inspektur DIY Nomor : 700/01336 tanggal 6 Mei 2019, perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Sistem AKIP tahun 2018 pada Dinas Kelautan dan Perikanan DIY</p> <p>Rekomendasi: Mempertahankan kinerja yang telah dicapai dan berupaya meningkatkan kinerja khususnya pada Aspek Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organsiasi.</p>	<p>Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja khususnya pada Aspek Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organsiasi dilakukan dengan langkah-langkah berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan rutin pegawai yang dilakukan seminggu sekali dalam bentuk apel maupun pembinaan rutin kepegawaian yang dilaksanakan minimal 1 bulan sekali; 2. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan secara rutin baik mingguan, bulanan, dan triwulanan; 3. Pencapaian sasaran/kinerja organisasi tahun 2019 telah mencapai 100%

BAB 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan 2019
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

Tahun 2019 merupakan tahun pertama penerapan Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*). Melalui Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, kelembagaan Pemerintah Daerah DIY didesain paralel (*inline*) dengan alur (*cascading*) kinerja visi, misi, tujuan, sasaran, program Pemda, dan program OPD yang diamanatkan dalam dokumen RPJMD 2017 – 2022.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan DIY yang merupakan penjabaran operasional RPJMD 2017 - 2022 telah mengakomodir dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2017 – 2022. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018.

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai cascade kinerja, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan yang didukung oleh program pengembangan sektor dominan (pertanian, industri pengolahan, jasa). Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan DIY selama lima tahun adalah :

“Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta”

Adapun sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, 2017-2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2017	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya nilai produksi perikanan	nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY tahun n (ADHK)	Juta rupiah	317.809	318.947	322.136	325.357	328.611	331.897	331.897
2.	Terkelolanya kawasan konservasi perairan	Peningkatan status kawasan konservasi	%	N/A	20	30	60	80	100	100

(Sumber: Dislautkan DIY, 2019)

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY	1. Penguatan fondasi pada SDM aparatur dan masyarakat, kelembagaan dan sarana prasarana kelautan dan perikanan 2. Penguatan daya saing pelaku usaha kelautan dan perikanan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur dan masyarakat kelautan dan perikanan, meningkatkan manajemen kelembagaan, meningkatkan sarana dan prasarana serta penerapan IPTEK
			Peningkatan produksi perikanan budidaya, tangkap dan olahan
			Meningkatkan kualitas hasil budidaya, tangkap dan produk olahan
			mengembangkan sistem pemasaran yang modern
2.	Terkelolanya kawasan konservasi perairan	1. Pengembangan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan 2. Pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan secara terintegrasi	Memberdayakan potensi alam dan masyarakat berwawasan lingkungan
			Menjaga dan mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan
			Menggerakkan partisipasi masyarakat

(Sumber: Dislautkan DIY, 2019)

2.3. Struktur Program dan Kegiatan 2019

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan DIY tahun 2019 sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3.1. Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2019

Sasaran		Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
1. Meningkatkan nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY	1.1.	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	3,956,016,000
	1.1.1.	Pelatihan teknis Perikanan Budidaya	863,173,000
	1.1.2.	Pelatihan Manajemen Usaha Perikanan Budidaya	3,092,843,000
	1.2.	Program Pengelolaan Pelabuhan	178,000,000
	1.2.1.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	99,000,000
	1.2.2.	Pelayanan Pelabuhan Perikanan	79,000,000
	1.3.	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1,718,546,500
	1.3.1.	Pelatihan Teknis Perikanan Tangkap	1,114,550,000
	1.3.2.	Pelatihan Manajemen Usaha Perikanan Tangkap	603,996,500
	1.4.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Produksi Perikanan	4,565,336,600
	1.4.1.	Pengolahan Hasil Perikanan	2,247,615,600
	1.4.2.	Pemasaran Hasil Perikanan	1,417,721,000
	1.5.	Program Pengembangan Perbenihan Perikanan Budidaya	3,562,333,897
	1.5.1.	Pelayanan Pengendalian Penyakit Ikan	218,980,400
	1.5.2.	Perbanyak Induk, Benih Unggul dan Teknologi Perikanan Budidaya	3,343,353,497
		Total Nilai Anggaran yang mendukung Sasaran 1	13,980,232,997
2. Meningkatkan status kawasan konservasi	2.1.	Program Konservasi Ekosistem Dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	985,792,500
	2.1.1.	Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	284,992,500
	2.1.2.	Gerakan Konservasi Ekosistem Kelautan dan Perikanan	109,484,000
	2.1.3.	Restocking Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	250,249,000
	2.1.4.	Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi	191,067,000
	2.1.5.	Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Prasarana di Pulau-pulau Kecil (DAK)	150,000,000
			Total Anggaran yang Mendukung Sasaran 2
		Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran	14,966,025,497

Struktur program dan kegiatan pendukung Dinas Kelautan dan Perikanan DIY tahun 2019 sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3.2. Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2019

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
1	2	3
1.	1. Program Administrasi Perkantoran	4,209,772,427
	1.1. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,982,880,310
	1.2. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1,764,409,117
	1.3. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	462,483,000
2.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4,933,928,496
	2.1. Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan gedung Kantor	2,028,757,496
	2.2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	856,236,000
	2.3. Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	266,612,000
	2.4. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	110,516,000
	2.5. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	583,944,000
	2.6. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana fasilitas pokok dan fasilitas fungsional Pelabuhan Perikanan (UPTD Provensi) (DAK)	1,087,863,000
3.	3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	441,722,200
	3.1. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	5,000,000
	3.2. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	35,452,500
	3.3. Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	324,130,700
	3.4. Monitoring dan Evakuasi Pelaksanaan Program/Kegiatan SKPD	77,139,000
	Total Anggaran Pendukung	9,585,423,123

(Sumber: Dislautkan DIY, 2019)

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur DIY sebagai berikut:

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Tahun 2019

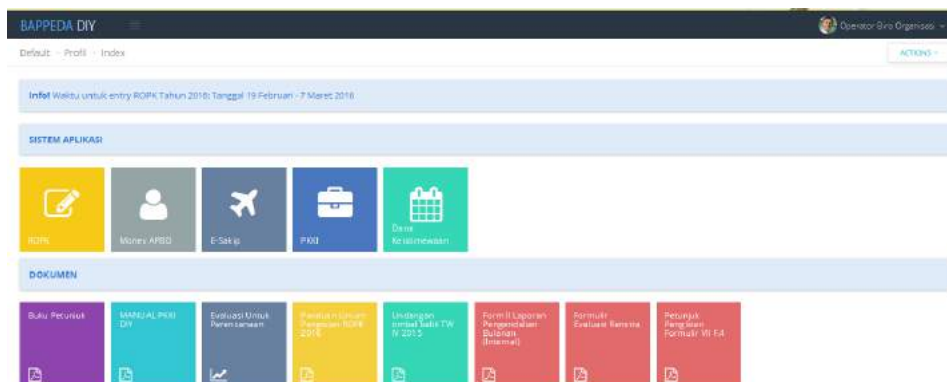
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1	Meningkatnya nilai produksi perikanan	Nilai Subsektor perikanan dalam PDRB DIY	Juta rupiah	322,136	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	322,136
2.	Terkelolanya kawasan konservasi perairan	Peningkatan status kawasan konservasi	persen	30	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	30

(Sumber: Dislautkan DIY, 2019)

2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi sungguh.jogjaprov.go.id yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD.

Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP



Sumber: <http://sungguh.jogjaprov.go.id/>

Dinas Kelautan dan Perikanan DIY juga mengelola website sebagai berikut:

Gambar II.2 Tampilan Website Dinas Kelautan dan Perikanan DIY



Sumber: <http://dislautkan.jogjaprov.go.id/>

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2019*
2. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis*
3. *Realisasi Anggaran*
4. *Inovasi*

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2019

Dinas Kelautan dan Perikanan DIY telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dengan Bapak Gubernur DIY tahun 2019. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ *Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan DIY beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	Base line 2017	Capaian 2018	TAHUN 2019				TARGET AKHIR RPJMD
						TAR GET	REALI SASI	PERSEN TASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4			5	6	7	8	
1	Meningkatnya nilai produksi perikanan	<p><u>Indikator:</u> Nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY (ADHK)</p> <p><u>Meta Indikator:</u> Nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY (ADHK) yang dikeluarkan oleh BPS</p>	Juta rupiah	317,809	320,348	322,136	322,386	100,08	Sangat Baik	331,897
2	Terkelolanya kawasan konservasi perairan	<p><u>Indikator:</u> Peningkatan status kawasan konservasi</p> <p><u>Meta Indikator:</u> 1. Tahap Penetapan RZWP, Inisiasi Kawasan konservasi 20% 2. Pencadangan kawasan konservasi, 30% 3. Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi 60% 4. Penetapan Kawasan Konservasi 80% 5. Penataan Batas Kawasan 100%</p>	persen	N/A	20	30	30	100	Sangat Baik	100

(Sumber: Dislautkan DIY, 2019)

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Sasaran 1: Meningkatkan nilai produksi perikanan

Kinerja sasaran terwujudnya meningkatnya nilai produksi perikanan diukur dengan indikator nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY (ADHK). Sumber data dari Badan Pusat Statistik (BPS) DIY.

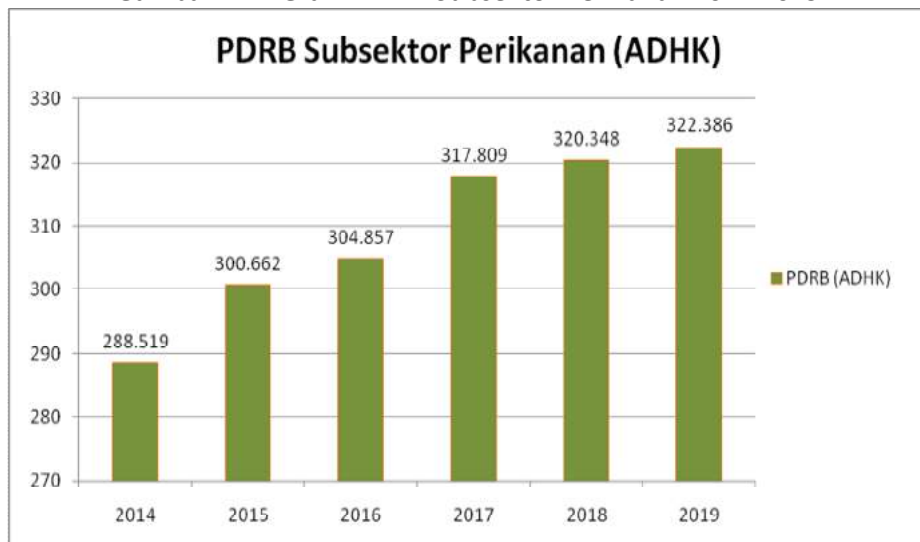
PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah/ wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai

barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi dalam suatu daerah/ wilayah pada suatu periode tertentu.

Produk Domestik Regional (PDB/PDRB) beserta indikator turunannya merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat kemajuan kegiatan perekonomian suatu wilayah atau negara. Penghitungan PDRB dapat dilakukan menggunakan tiga pendekatan, yakni produksi, pendapatan, dan pengeluaran.

Menurut pendekatan produksi, PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha/ ekonomi dalam suatu daerah/ wilayah pada suatu periode tertentu (biasanya satu tahun). Untuk penghitungan tahun 2019 menggunakan proyeksi dengan metode regresi berdasarkan nilai PDRB Subsektor Perikanan tahun-tahun sebelumnya, karena data resmi dari BPS belum dirilis. Berikut disajikan grafik PDRB subsektor perikanan di DIY tahun 2014-2019:

Gambar III.1. Grafik PDRB Subsektor Perikanan 2014-2019



(Sumber: Dislautkan DIY, 2019)

PDRB dihitung berdasarkan atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau

pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menjadi indikator semakin tingginya pendapatan masyarakat sehingga tingkat kemiskinan menjadi semakin berkurang.

Pada Grafik II. 1 terlihat bahwa nilai PDRB Subsektor Perikanan meningkat dari tahun ke tahun. Rata-rata peningkatan PDRB subsektor perikanan sebesar 100,08%. Dapat dikatakan bahwa subsektor perikanan mengalami pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2019 produksi perikanan mencapai 115.918 Ton. Terdiri dari produksi perikanan budidaya sebesar 109.548 Ton dan perikanan tangkap sebesar 6.370 Ton. Nilai produksi perikanan juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, seperti disajikan ada tabel berikut ini:

Tabel III.5 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan

Tahun	Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp)
2014	71.960,99	1.335.969.356
2015	74.705,24	1.417.009.418
2016	81.876,80	1.627.339.093
2017	95.365,52	1.895.433.672
2018	102.432,64	2.074.261.142
2019	115.918,29	2.376.324.945

(Sumber : Dislautkan,2019)

Meningkatnya produksi perikanan yang juga diikuti oleh meningkatnya nilai produksi perikanan akan berdampak pada meningkatnya pendapatan pembudidaya ikan dan nelayan. Peningkatan pendapatan ini juga berarti meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sektor perikanan.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mempunyai kontribusi besar dalam pembentukan PDRB DIY laju perkembangannya termasuk lambat baik atas dasar harga berlaku maupun perkembangan riil atas dasar harga konstan. Hal ini menunjukkan masih minimnya inovasi untuk meningkatkan nilai tambah aktivitas ekonomi dalam lingkup pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan, sehingga perlu terobosan teknologi untuk pengelolaan usaha agar produktivitas output meningkat.

Gambar III.2. Usaha Perikanan Budidaya dengan Sistem Kolam Bulat



Terbatasnya penyediaan untuk memenuhi konsumsi internal daerah. Oleh karena itu kondisi ini dapat menjadi pendorong bagi unit-unit produksi untuk mengoptimalkan kapasitas produksi atau meningkatkan kualitas produksi sehingga memiliki daya saing lebih terhadap produk luar daerah. Demikian pula seharusnya juga menjadi ruang untuk optimalisasi peran pemerintah dengan akurasi kebijakan perencanaan maupun terobosan implementasinya untuk menyiapkan berbagai insentif investasi yang mudah dalam birokrasinya untuk dapat mendorong pembangunan industri berorientasi ekspor dan pabrikan yang menghasilkan produk kebutuhan di wilayah domestik.

Gambar III.3. Bimbingan Teknis Penggunaan Akat Tangkap Ramah Lingkungan untuk Nelayan



Peran pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih sangat dibutuhkan, seperti sebagai penyelenggara pendidikan, kesehatan, dan juga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Peran pemerintah juga bisa hadir dalam bentuk intervensi program yang diperuntukkan membantu penduduk yang berpenghasilan rendah berupa subsidi atau dalam bentuk hibah.

3.1.2. Sasaran Terkelolanya kawasan konservasi perairan

Tolok ukur capaian sasaran Terkelolanya kawasan konservasi perairan diukur dengan indikator peningkatan status kawasan konservasi. Peningkatan status kawasan konservasi terdiri dari lima tahapan, yaitu:

1. Tahap Penetapan RZWP, Inisiasi Kawasan konservasi (20%)
2. Pencadangan kawasan konservasi (30%)
3. Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi (60%)
4. Penetapan Kawasan Konservasi (80%)
5. Penataan Batas Kawasan (100%)

Kawasan lindung perairan atau kawasan konservasi perairan menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.30/MEN/2010 adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

Kawasan konservasi perairan di DIY telah tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 271/KPTS/2013 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan di Kabupaten Gunungkidul tanggal 2 September 2013 dan Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 284 Tahun 2014 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Taman Pesisir di Kabupaten Bantul tanggal 28 April 2014. Kawasan konservasi perairan di DIY berlokasi di Wediombo, Kabupaten Gunungkidul serta di Patehan dan Baros Kabupaten Bantul.

Gambar III.4. Dokumen Perda DIY tentang RZWP3K



Tahap Penetapan RZWP, Inisiasi Kawasan konservasi telah selesai dilakukan di tahun 2018 dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2038 tanggal 24 September 2018

Gambar III.5. Dokumen Pergub Perizinan Pengelolaan Pesisir



Tahap Pencadangan kawasan konservasi juga telah dilakukan pada tahun 2019. Sesuai surat dari Dirjen Pengelola Rang Laut Nomor 552/DJPR.L5/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 bahwa provinsi yang sudah menetapkan RZWP3K tidak perlu SK Pencadangan Gubernur. Sehingga dengan demikian DIY secara otomatis telah melakukan pencadangan kawasan konservasi melalui RZWP3K.

Gambar III. 6. Sosialisasi Pergub Perizinan Pengelolaan Kawasan Pesisir



3.2. Analisis Ketercapaian Kinerja Tahun 2019

Berdasarkan Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2019, dapat dilakukan analisis sebagai berikut:

3.2.1. Sasaran 1: Meningkatnya nilai produksi perikanan

Meningkatnya nilai produksi perikanan dengan indikator nilai PDRB (ADHK) subsektor perikanan tercapai 322.386 juta rupiah. Dengan demikian prosentase realisasi terhadap target= 100,08%, maka target tahun 2019 tercapai.

Ketercapaian indikator ini dibandingkan realisasi tahun lalu, terdapat kenaikan sebesar 101,56 %. Dan dibandingkan dengan target akhir RPJMD, diproyeksikan sasaran Meningkatnya nilai produksi perikanan akan berhasil tercapai

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini didukung oleh peningkatan produksi perikanan budidaya dan tangkap di DIY. Dari digram dibawah terlihat bahwa produksi perikanan di DIY terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 produksi perikanan budidaya meningkat sebesar 113,17%. Rata-rata peningkatan produksi perikanan dari tahun 2014-2019 sebesar 110,093%. Produksi perikanan budidaya didominasi oleh ikan Lele (31.507 ton), Nila (31.161 ton), Gurami (13.009 ton), Bawal (10.375 ton) dan sisanya jenis lain (udang galah, ikan Mas, udang vaname, tawes, patin, mujaer).

Gambar III.7. Produksi Perikanan DIY 2014-2019



(Sumber: Dislautkan DIY, 2019)

Produksi perikanan budidaya yang baik juga didukung oleh adanya ketersediaan benih ikan yang bermutu. Benih perikanan budidaya dari Balai Pengembangan Perikanan Budidaya (BPTPB) yang terdistribusi terdiri dari benih nilasa (441.393.102), najawa (45.895.500), lele (241.163.000) dan udang galah (9.205.000) sehingga total benih yang terdistribusi sebesar 737.656.620.

Selain produksi perikanan, nilai produksi ikan yang masuk melalui pelabuhan/tempat pelelangan ikan juga meningkat. Tahun 2019 tercapai 54,61 Milyar rupiah. Target nilai produksi ikan tercapai karena didukung oleh jumlah produksi ikan relatif banyak, harga ikan relatif stabil dan kualitas hasil tangkapan baik/segar. Ikan yang tertangkap merupakan jenis ikan komoditas ekspor yaitu layur, cakalang, tuna, layang, tongkol dan jenis lainnya.

Ketercapaian sasaran ini didukung oleh Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap, Program Pengolahan Dan Pemasaran Produksi Perikanan, Program Pengelolaan Pelabuhan, dan Program Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya.

3.2.2. Sasaran 2: Terkelolanya Kawasan Koservasi Perairan

Sasaran Terkelolanya Kawasan Koservasi Perairan tercapai 30%, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target = 100%, maka target tahun 2019 tercapai. Dibandingkan realisasi tahun lalu, terdapat kenaikan sebesar 150%. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini disebabkan oleh terlaksananya kegiatan penyusunan dokumen acuan Perijinan Pemanfaatan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di DIY serta Tersedianya acuan Perijinan Pemanfaatan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di DIY.

Tahap Pencadangan kawasan konservasi juga telah terlaksana melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2038.

Program yang mendukung tercapainya target Terkelolanya kawasan konservasi perairan adalah Program Rehabilitasi Ekosistem Dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, dengan 2 (dua) kegiatan, yaitu:

- Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Ikan dan Laut,
- Pengelolaan Sumberdaya Kelautan.

Selain program tersebut, Dinas Kelautan dan perikanan juga mendapatkan dukungan dari Dana Keistimewaan melalui Program Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten (Danais) , dengan kegiatan Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten. Dalam kegiatan ini dihasilkan bahan untuk penetapan Rapergub DIY tentang Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

3.3. Realisasi Anggaran

Berikut disajikan anggaran dan realisasi anggaran untuk tiap sasaran di Dinas Kelautan dan Perikanan DIY:

Tabel III.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Meningkatnya nilai produksi perikanan	Nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY (ADHK)	322,136 juta rupiah	322.386 juta rupiah	100,08	13.980.232.997	12.906.240.179	92,32
2	Terkelolanya kawasan konservasi perairan	Peningkatan status kawasan konservasi	30%	30%	100	985.792.500	791.335.548	80,27
Program terkait langsung sasaran						14.966.025.497	13.697.575.727	91,52
Program pendukung						9.585.423.123	8.913.825.394	92,99
Total Belanja Langsung						24.551.448.620	22.611.401.121	92,01

(Sumber: Dislautkan DIY, 2019)

Berdasarkan tabel III.5 di atas dari total belanja langsung program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp.14.966.025.497,00, terealisasi Rp. 13.697.575.727,00 atau 91,52%. Sisa anggaran sebesar Rp. 1.268.449.770,00 atau 8,48% antara lain bersumber dari:

- Sisa pengadaan barang dan jasa dari belanja jasa keamanan kantor Rp. 9.650.004,-, sisa honor non PNS Rp. 45.789.860,- honor pengelola keuangan dan kepegawaian (personil kurang) Rp. 5.035.000, serta iuran BPJS Rp. 2.298.000,-

- Sisa pengadaan barang dan jasa belanja alat-alat perlengkapan sebesar Rp. 142.748.200,-
- Sisa pengadaan barang dan jasa belanja alat-alat perlengkapan sebesar Rp. 175.379.000,-
- Sisa anggaran merupakan efisiensi kegiatan Pencadangan Kawasan Konservasi oleh Gubernur, karena sesuai surat dari Dirjen Pengelola Rang Laut Nomor 552/DJPRL.5/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 bahwa provinsi yang sudah menetapkan RZWP3K tidak perlu SK Pencadangan Gubernur
- Sisa pembayaran listrik dan telepon (sesuai tagihan).

Dari anggaran program pendukung sebesar Rp. 9.585.423.123,00 terealisasi Rp. 8.913.825.394,00 atau mencapai 92,99%. Secara keseluruhan dari total belanja langsung sebesar Rp. 24.551.448.620,00 terealisasi Rp. 22.611.401.121,00 atau mencapai 92,01%.

Meskipun belanja tidak terserap 100% namun keseluruhan sasaran strategis OPD tercapai 100%, sehingga dengan demikian terdapat efisiensi belanja dari total anggaran sebesar Rp.1.940.047.499,00 (7,9%).

3.4. Inovasi

Dinas Kelautan dan Perikanan DIY juga telah melakukan inovasi pembangunan kelautan dan perikanan di DIY, salah satunya adalah dengan program SIM PROPEKAN DAYA .

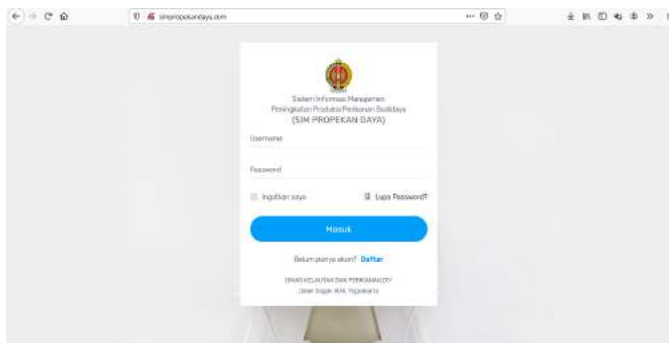
SIM PROPEKAN DAYA adalah Sistem Informasi Manajemen Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, merupakan sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai untuk mendukung Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya. SIM PROPEKAN DAYA dibangun dengan berbagai tahapan kegiatan mulai dari penyusunan data base, pembuatan aplikasi monitoring dan evaluasi pembudidaya ikan/ hibah, pembuatan aplikasi perencanaan partisipatif, dan pengembangan dash board layanan unggulan kesehatan ikan dan lingkungan serta pengembangan jejaring kerja pendukung program tersebut. Output dari SIM PROPEKAN DAYA digunakan oleh berbagai stakeholder (pembudidaya ikan, penyuluh perikanan bantu, penyuluh perikanan swadaya, petugas kabupaten/kota, petugas provinsi) saat membuat keputusan untuk membantu memecahkan berbagai permasalahan yang ada dalam rangka mewujudkan peningkatan produksi perikanan budidaya.

Dalam Website www.simpropekandaya.com terdapat beberapa fitur laporan yang terdiri atas : Laporan awal, Laporan Proses/Progres Budidaya dan Laporan Panen. Pada Website ini diberikan 3 tingkatan login yang memiliki hak akses berbeda-beda sesuai dengan tugas dan kewenangannya, yaitu : Login User, Login Kabupaten/ Kota dan Login Administrator.

Manfaat penggunaan www.simpropekandaya.com baik bagi Pokdakan maupun Dinas Kelautan dan Perikanan DIY :

- Hasil input data pada Pelaporan Awal dan Pelaporan Proses yang dapat menghitung otomatis perbandingan pakan masuk dan bobot ikan yang dihasilkan atau biasa disebut Feed Conversion Ratio (FCR) merupakan acuan terpenting bagi sebuah usaha budidaya untuk memprediksi normal atau tidaknya pertumbuhan komoditas ikan yang dipelihara sehingga mampu menentukan apakah usaha budidaya yang dilakukan dalam kondisi untung atau justru merugi.
- Penghitungan Survival Rate (SR) merupakan tingkat kehidupan komoditas ikan yang hidup di wadah budidaya sehingga mampu digunakan untuk memprediksi biomass (bobot ikan) dalam acuan penentuan persentase porsi pakan yang tepat sehingga pertumbuhan ikan dapat optimal dan kualitas air senantiasa terjaga.
- Analisis Laba/Rugi pada laporan Panen memudahkan Pokdakan mengetahui analisis usaha secara mendetail dari tiap kolam budidayanya dalam kondisi untung atau merugi sehingga dapat digunakan sebagai acuan terhadap evaluasi proses budidaya selanjutnya yang tentu saja menunjang keberlangsungan dari usaha budidaya perikanan dari sebuah Pokdakan.

Gambar III.8. Sistem Informasi Manajemen Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (www.simpropekandaya.com)



BAB 4

Penutup

Bab 4 Berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Rekomendasi Peningkatan kinerja*

Hasil laporan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan DIY tahun 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut:

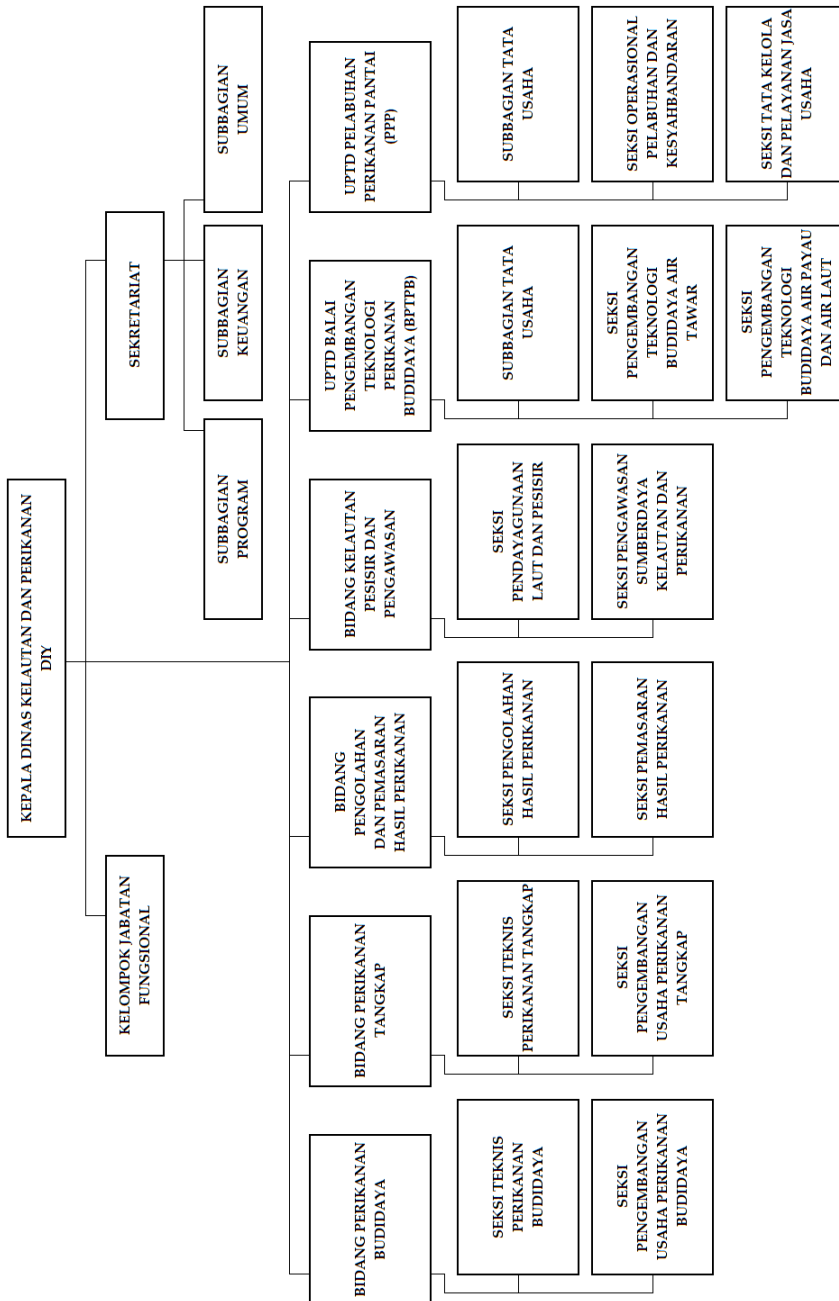
1. Permasalahan yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan DIY antara lain keterbatasan kuantitas Sumberdaya Manusia (SDM) di Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, sehingga membatasi ruang gerak pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Selain itu persaingan dunia usaha diluar sektor perikanan juga mempengaruhi jumlah tenaga kerja sektor perikanan.
2. Faktor keberhasilan Dinas Kelautan dan Perikanan, yaitu dukungan dana baik APBD, APBN maupun Dana Keistimewaan sehingga dapat optimal melayani masyarakat. Selain itu, kekompakan personil memegang peran penting dalam penyelesaian tupoksi dan pelayanan ke mayarakat. Stakeholder kelautan dan perikanan juga turut serta mendukung secara aktif untuk memajukan sektor kelautan dan perikanan.

Adapun rencana aksi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Koordinasi dan komunikasi internal Dinas Kelautan dan Perikanan secara lebih intensif dan humanis.
2. Koordinasi dan sinergi dengan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat serta stakeholder kelautan dan perikanan.
3. Penyelesaian pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarta akan terus diupayakan bersama Tim Percepatan DIY, BPKA DIY dan PT. PII bersama Bappenas
4. Pengusulan penambahan personil SDM ke Badan Kepegawaian Daerah agar personil yang ditempatkan sesuai dengan bidang keahlian kelautan dan perikanan

LAMPPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi



Lampiran 2. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

Tabel Tujuan, Sasaran, dan Target Kinerja Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan (Renstra)	Sasaran (Renstra)	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
				Ke-				
				1	2	3	4	5
				2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	Meningkatnya nilai produksi perikanan	Nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY (ADHK) (juta rupiah)	318.947	322.136	325.357	328.611	331.897
		Terkelolanya kawasan konservasi perairan	Peningkatan status kawasan konservasi (%)	20	30	60	80	100

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2019



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Sagan III/4, Yogyakarta, Telepon (0274) 512386; Faksimile (0274) 560386
Website : <http://www.dislautk.jogjaprov.go.id>, Email : dislautk@jogjaprov.go.id, Kode Pos 55223

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. BAYU MUKTI SASONGKA, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan DIY
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HAMENGGU BUWONO X
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, Januari 2019



PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan DIY
Tahun Anggaran : 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya produksi perikanan	Nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY	juta rupiah	322.136	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 322.136
2.	Terkeolainya kawasan konservasi perairan	Peningkatan status kawasan konservasi	persen	30	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 30

Jumlah Anggaran

- Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya : Rp. 3.887.016.000,00
Keterangan :
Anggaran APBD : Rp. 24.210.309.020,00
Anggaran Dekonsentrasi/ TP : Rp. 2.262.267.000,00
- Program Pengelolaan Pelabuhan : Rp. 178.000.000,00
- Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap : Rp. 1.718.546.500,00
(Pangampu) : Rp. 500.000.000,00
- Program Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan : Rp. 4.539.056.600,00
- Program Konservasi Ekosistem dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan : Rp. 949.792.500,00

- 6. Program Pengembangan Perbenihan Perikanan Budidaya : Rp. 3.562.333.897,00
- 7. Program Administrasi Perkantoran : Rp. 4.176.856.027,00
- 8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Rp. 4.722.488.496,00
- 9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan : Rp. 476.219.000,00

Yogyakarta, Januari 2019



Lampiran 4. Evaluasi LKj IP Tahun Sebelumnya



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
INSPEKTORAT**

Kompleks Youth Center, Jalan Kebon Agung, Tiogoadi, Mlati, Sleman
Telepon (0274) 562009 Faksimile (0274) 512567

Website: <http://inspektorat.jogjaprov.go.id> Email : inspektorat@jogjaprov.go.id

Yogyakarta, 06 - 05 - 2019

Nomor : 100 / 01336

Kepada

Lampiran :

Yth. Gubernur

Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Sistem
AKIP Tahun 2018 pada Dinas
Kelautan dan Perikanan DIY

Daerah Istimewa Yogyakarta
di
Yogyakarta

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP, maka diindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Tugas Inspektur DIY Nomor 115/III/INSPI/2019 Tanggal 5 Maret 2019 tentang Evaluasi atas Implementasi SAKIP SKPD Tahun 2018 untuk seluruh SKPD. Sehubungan hal tersebut, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. Dalam melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Tim Evaluasi (Evaluators) Inspektorat DIY melakukan penilaian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. Aspek Perencanaan Kinerja meliputi:
 - 1) Perencanaan Strategis, meliputi Sub Komponen Pemenuhan Renstra, Kualitas Renstra dan Implementasi Renstra;
 - 2) Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, meliputi Sub Komponen Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan dan

Perjanjian Kinerja, serta Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahunan.

- b. Aspek Pengukuran Kinerja meliputi:
 - 1) Pemenuhan Pengukuran;
 - 2) Kualitas Pengukuran;
 - 3) Implementasi Pengukuran.
 - c. Aspek Pelaporan Kinerja meliputi:
 - 1) Pemenuhan Pelaporan;
 - 2) Penyajian Informasi Kinerja;
 - 3) Pemanfaatan Informasi Kinerja.
 - d. Evaluasi Internal meliputi:
 - 1) Pemenuhan Evaluasi;
 - 2) Kualitas Evaluasi;
 - 3) Pemanfaatan Evaluasi.
 - e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi meliputi:
 - 1) Kinerja yang Dilaporkan (Output);
 - 2) Kinerja yang Dilaporkan (Outcome);
 - 3) Kinerja yang Dilaporkan (IKU);
 - 4) Kinerja dari Penilaian Stakeholder.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY memperoleh nilai sebesar 85,59 kategori A dengan interpretasi memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel;
4. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dengan rincian sebagai berikut:
- a. Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 26,83 atau 89,77% dari bobot sebesar 30%;
 - b. Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 22,08 atau 88,33% dari bobot sebesar 25%;
 - c. Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12,70 atau 84,69% dari bobot sebesar 15%;
 - d. Evaluasi Internal memperoleh nilai 8,25 atau 82,50% dari bobot sebesar 10%;
 - e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi memperoleh nilai 15,63 atau 78,13% dari bobot sebesar 20%.
5. Terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat DIY pada Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun 2017, sudah dilakukan perbaikan kinerja pada Aspek Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.
-

6. Sehubungan dengan hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2018 seperti tersebut pada angka 4 di atas, direkomendasikan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY beserta seluruh jajarannya agar pada tahun anggaran berikutnya mempertahankan kinerja yang telah dicapai dan berupaya meningkatkan kinerja khususnya pada Aspek Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2018 pada Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

INSPEKTUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Tembusan :
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY

Lampiran 5. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jalan Sagan Nomor III/4, Telepon (0274) 512386 Faksimili (0274) 560386
YO GYAKARTA

TANGGAPAN/TINDAK LANJUT EVALUASI LKJ IP TAHUN SEBELUMNYA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DIY

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1	Mempertahankan/meningkatkan kinerja yang telah dicapai, yaitu pada Aspek Perencanaan Kinerja, pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja	Telah dipertahankan/ditingkatkan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan DIY pada aspek Perencanaan Kinerja, pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja
2	Melakukan upaya perbaikan pada aspek Pencapaian Sasaran Kinerja Organisasi, khususnya capaian kinerja dari penilaian stake holder	Telah dilakukan upaya perbaikan pencapaian sasaran kinerja organisasi, pencapaian kinerja mencapai 100% .

Yogyakarta, 28 Februari 2019

Kepala,



Ir. Bayu Mukti Sasongka, M.Si
NIP. 19641103 199102 1 001